



# Konstruksi Konsep Pengelolaan Keamanan Nasional Berbasis Masyarakat Adat di Bali

Anak Agung Putu Sugiantiningsih<sup>1\*</sup>, I Made Adiwidya Yowana<sup>2</sup>, I Gede Putu Yasa<sup>3</sup>, I Made Yunita<sup>4</sup>, Moch.Noor<sup>5</sup>, I Gde Oka Saputra<sup>6</sup> 

<sup>1,2,3,4,5,6</sup> Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Wira Bhakti, Indonesia

## ARTICLE INFO

### Article history:

Received August 22, 2022

Revised August 29, 2022

Accepted October 14, 2022

Available online October 25, 2022

### Kata Kunci:

Desa Adat, Pecalang, Awig-Awig

### Keywords:

Traditional Village, Pecalang, Awig-Awig



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2022 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.

## ABSTRAK

Bali merupakan salah satu Provinsi di Indonesia yang masih terus melestarikan adat dan budaya. Bali terkenal akan pariwisata, keberagaman budaya serta adat istiadatnya. Banyaknya terjadi kasus pencurian pratima, perkelahian, bahkan pembunuhan, menyebabkan kekhawatiran wisatawan untuk berkunjung ke Bali. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis konstruksi konsep pengelolaan keamanan nasional berbasis masyarakat adat di Bali. Identifikasi elemen-elemen yang memperkuat desa adat, untuk merekonstruksi pembangunan keamanan yang berskala Nasional tanpa meninggalkan budaya yang berbalut kearifan lokal Bali. Penelitian ini menggunakan perspektif pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan dengan metode observasi, wawancara, atau dokumentasi. Proses penggalian data dilakukan dengan Teknik snow-ball. Berdasarkan informasi potensi yang diperoleh pada tahap I, kemudian dianalisis konstruksi pengelolaan baik dalam tupoksi, sumber daya manusia, kesejahteraan dan sarana dan prasarana penunjang yang diperlukan untuk tercapainya konsep pengelolaan keamanan nasional yang berbasis masyarakat adat di Bali. Yang ideal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keamanan nasional berbasis masyarakat adat di Bali telah berjalan sesuai dengan konsep falsafah Tri Hita Karana tanpa mengabaikan realita fenomena keamanan dunia. Mengingat Bali adalah objek utama tujuan wisatawan baik lokal maupun internasional.

## ABSTRACT

Bali is one of the provinces in Indonesia that still continues to preserve customs and culture. Bali is famous for its tourism, cultural diversity and customs. The many cases of pratima theft, fights, and even murders have caused concern for tourists visiting Bali. The purpose of this research is to analyze the construction of the concept of national security management based on indigenous peoples in Bali. Identification of elements that strengthen traditional villages, to reconstruct security development on a national scale without abandoning culture wrapped in Balinese local wisdom. This study uses a qualitative approach perspective. Data is collected by observation, interview, or documentation methods. The data mining process was carried out using the snow-ball technique. Based on the potential information obtained in stage I, then analyzed the construction of good management in terms of duties, human resources, welfare and supporting facilities and infrastructure needed to achieve the concept of national security management based on indigenous peoples in Bali. The ideal. The results of the study show that the management of national security based on indigenous peoples in Bali has been running according to the concept of the Tri Hita Karana philosophy without ignoring the reality of world security phenomena. Considering that Bali is the main object of tourist destination both local and international.

## 1. PENDAHULUAN

Bali merupakan salah satu Provinsi di Indonesia yang masih terus melestarikan adat dan budaya. Bali terkenal akan pariwisata, keberagaman budaya serta adat istiadatnya. Masyarakat Bali memiliki pola kehidupan yang sangat *rigid* dan terikat pada norma-norma baik agama maupun social (Putri et al., 2018; Suarta, 2018). Dalam konteks norma agama misalnya Bali didominasi oleh Agama Hindu sebagai mayoritasnya Hindu seringkali dianggap sebagai agama yang beraliran polytheisme karena memuja banyak Dewa. Namun demikian dalam Agama Hindu, Dewa bukanlah Tuhan tersendiri. Dewa adalah manifestasi dari *Ida*

\*Corresponding author.

E-mail addresses: [gektien@gmail.com](mailto:gektien@gmail.com) (Anak Agung Putu Sugiantiningsih)

*Sanghyang Widhi Wasa*/Tuhan Yang Maha Esa (Paramandhita, 2017; Suadnyana, 2020). Bali dikenal dengan masyarakat yang ramah, serta budaya yang unik yang menjadi ciri khasnya. Bali sering kita anggap sebagai daerah yang netral, bebas dari pengaruh global dan kuat bertahan dengan tradisinya. Pandangan ini mendudukan Bali sebagai semacam warisan yang harus dijaga dan dijauhkan dengan perubahan-perubahan yang disebabkan berbagai krisis, entah tingkatan Nasional maupun Global. Disinilah terdapat anggapan tentang Bali ini menjadi semacam disiplin, yang ditaati oleh segenap masyarakat Bali dan menjadi tolak ukur perkembangan Bali yang normal. Bali merupakan daerah yang khas karena Bali memiliki kekhususan. Salah satunya adalah desa adat yakni ikatan kesatuan wilayah yang terwujud dalam bentuk komunitas desa adat Bali dikenal memiliki dua desa yaitu desa dinas dan desa adat (Artajaya & Wiasta, 2020; Suciati, 2021). Desa adat merupakan salah satu keistimewaan yang dimiliki Bali. Keunikan adat dan budayanya. menjadikan Bali sebagai ikon pariwisata Indonesia (Purwita, 2018; Sumarto & Dwiantara, 2020).

Di Bali kita juga mengenal adanya *awig-awig*. *Awig-awig* merupakan norma hukum adat yang bertujuan untuk menciptakan ketertiban dengan mengatur pola perilaku warga masyarakat dalam berinteraksi (Pertiwi & Mardiana, 2020; Putri et al., 2018). *Awig-awig* membuat masyarakat lebih terikat dan memahami benar apa yang menjadi kewajiban dan apa hak dari masyarakat di dalam lingkungan *desa Adat* pada khususnya (Mahadewi et al., 2020; Rindawan, 2017). Substansi *awig-awig desa adat*, juga dikatakan dijiwai oleh Agama Hindu yang merupakan penjabaran dari falsafah *Tri Hita Karana*, yaitu pertama, *Parhyangan* sebagai kongkretisasi tempat pemujaan kepada *Sang Hyang Widhi Wasa* yang mengatur kegiatan manusia dalam melakukan hubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa dalam wujud upacara keagamaan; kedua, *pawongan* sebagai perwujudan hubungan manusia dengan sesamanya dalam melaksanakan berbagai kegiatan sosial; dan ketiga, *palemahan* atau wilayah berupa perwujudan hubungan manusia dengan alam yang menjadi tempat pemukiman dan sumber kehidupan masyarakat (Putrawan et al., 2021; Suadnyana, 2021).

Namun fenomena yang terjadi kini di Bali sudah jauh berbeda dengan Bali yang dulu. Akhir-akhir ini Bali sudah seperti Jakarta macet dimana-mana. Pelaksanaan upacara adat tanpa bantuan pengamanan juga menyebabkan kemacetan. Selain itu banyak berita perkelahian antar sesama remaja, banyak terjadi pencurian pertama di pura-pura (Zainudin et al., 2022). Jika kejadian-kejadian ini terus berulang akan memberikan citra yang buruk pada pulau Bali yang berpengaruh terhadap pariwisata Bali. Oleh karena itu, terjadinya fenomena yang ada saat ini mengharuskan dibentuknya kelompok satuan petugas keamanan yang berjaga di lingkungan desa adat. Salah satunya adalah *Pecalang*. *Pecalang* memiliki tugas pokok yakni menjaga keamanan dan kelancaran jalannya upacara agama, dan menjaga ketertiban tempat suci di wilayahnya (Dewi, 2018; Suciati, 2021). *Pecalang* berasal dari kata "calang" dan menurut theologinya dari kata "celang" yang dapat diartikan waspada. Dari sini dapat artikan secara bebas, "pecalang" adalah seseorang yang ditugaskan untuk mengawasi keamanan desa adatnya. Ibaratnya sebagai petugas keamanan desa adat. *Pecalang* memiliki kekuatan Hukum yang mampu digunakan untuk menertibkan, bahkan mencegah datangnya hal-hal yang dianggap mengancam kebudayaan Bali (Dewi, 2018; Putra et al., 2021).

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa keamanan nasional berpengaruh terhadap daya tarik suatu daerah (Dewi, 2018; Putra et al., 2021). Penelitian lainnya menunjukkan bahwa untuk menciptakan Negara yang aman dan damai, masyarakat perlu sadar untuk ikut serta menjaga keamanan daerahnya masing-masing (Markus et al., 2018). Adapun tujuan khusus dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana konstruksi Konsep Pengelolaan Keamanan Nasional Berbasis Masyarakat Adat di Bali. Identifikasi Elemen-elemen yang memperkuat desa adat, untuk merekonstruksi pembangunan keamanan yang berskala Nasional tanpa meninggalkan budaya yang berbalut kearifan lokal Bali.

## 2. METODE

Penelitian ini menggunakan perspektif pendekatan kualitatif. Metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Penelitian deskriptif tidak memberikan perlakuan, manipulasi atau perubahan pada variable-variabel yang diteliti, melainkan menggambarkan suatu kondisi yang apa adanya, melalui observasi, wawancara, atau dokumentasi. Daftar pertanyaan/ Pernyataan dibuat untuk mengidentifikasi sistem. Identifikasi sistem diperlukan untuk mengetahui variabel-variabel yang mempengaruhi sistem secara keseluruhan. Variabel yang digali adalah kondisi existing yang ada saat ini dan potensi pengembangan agro-ekowisata. Proses penggalian data dilakukan dengan Teknik snow-ball. Berdasarkan informasi potensi yang diperoleh pada tahap I, kemudian dianalisis konstruksi pengelolaan baik dalam tupoksi, sumber daya manusia, kesejahteraan dan sarana dan prasarana penunjang yang diperlukan untuk tercapainya konsep pengelolaan keamanan nasional yang berbasis masyarakat adat di

Bali. Yang ideal. Selain itu dilakukan analisis faktor-faktor yang menunjang konstruksi pengelolaan keamanan nasional yang berbasis masyarakat adat di Bali. Dalam mengkonstruksi konsep pengelolaan keamanan nasional berbasis masyarakat adat di Bali, maka sangat penting dilakukan pengembangan organisasi/wadah pengelola keamanan tersebut. Agar di dalam pengelola yang dikonstruksikan dapat sesuai dengan budaya adat dan kearifan lokal masyarakat setempat.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Hasil

Konstruksi Konsep Pengelolaan Keamanan Nasional Berbasis Masyarakat Adat di Bali

Ada ribuan *pecalang* yang tergabung dalam sistem pengamanan lingkungan terpadu berbasis desa adat (Sipandu Beradat) akan dilibatkan dalam pengamanan KTT G20. *Sipandu Beradat* ini telah diberikan pelatihan pengetahuan dan peningkatan kemampuan dalam melaksanakan tugas kepolisian secara terbatas. Dia menjelaskan, *Sipandu Beradat* merupakan bentuk kemitraan polisi dengan masyarakat berbasis *community policing*. Ada beberapa komponen di dalamnya, mulai Bankamda, Linmas hingga *pecalang*. Keberadaan Sipandu Beradat telah dikukuhkan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, akhir Februari 2022 lalu. Hingga kini, sudah terbentuk 50 forum Sipandu Beradat di wilayah hukum Bali.

Akan tetapi, perlu kita bersama sadari, dengan ditandai adanya penambahan pasal Dewan Keamanan PBB tentang *peacekeeping*, Pasal 5 DK PBB mengatur tentang konsep penjagaan keamanan dengan jalan kekerasan dan pasal 6 mengatur tentang penjagaan keamanan dalam jangka panjang. Hingga DK PBB menambahkan pasal 5,5 yang mengatur adanya perang tanpa kekerasan dan adanya pemulihan keadaan negara pasca perang terjadi baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Akan menjadi persoalan yang serius terhadap keamanan Bali mengingat Bali merupakan tujuan utama wisata dunia.

Dengan demikian, adanya permasalahan keamanan dunia tentunya membuat masyarakat merasa dirinya terancam dan timbul konsep *human security*. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa *human security* dibagi menjadi tujuh, yaitu *economic security, food security, health security, environment security, personal security, dan community security*. Serta adanya *gender mainstreaming* dan *transnasional organized crime*.

#### Economic Security (Keamanan Ekonomi)

Apabila tidak ada jaminan perlindungan ekonomi bagi setiap individu, maka yang terjadi adalah berbagai masalah kompleks akan muncul seperti akses terhadap makanan, kesehatan dan berbagai penunjang kehidupan akan sulit terpenuhi. Sehingga menimbulkan krisis bukan hanya bagi seorang individu itu saja, akan tetapi dampaknya akan dirasakan oleh lingkungan disekitarnya. Contohnya saja kasus yang ekonomi yang terjadi di Indonesia, yaitu hampir 40 % penduduk Indonesia hidup dalam kondisi kemiskinan atau hampir miskin. Dapat kita simpulkan bahwa *Economic Security* di Indonesia belum terjamin sepenuhnya (Saputro & Meirinaldi, 2021). Padahal laju pertumbuhan tingkat perekonomian kita sangat pesat sekali. Akan tetapi, dampaknya hanya terasa bagi kalangan elit pengusaha dan elit politik saja. Masyarakat kelas menengah ke bawah paling merasakan dampak ini, yang akan mendorong mereka dalam krisis kepercayaan hingga berdampak kriminalitas.

Kesenjangan ekonomi yang sangat signifikan antara kalangan atas dan kalangan bawah. Maka dapat dikatakan belum terjamin keamanan dalam sektor ekonomi di Indonesia dan berimplikasi menimbulkan masalah tersendiri bagi proses perkembangan negara yang sedang berusaha bangkit dari 2 (dua) tahun masa pandemic covid-19 yang meluluh lantakkan pariwisata sebagai sumber pendapatan utama di Indonesia pada umumnya dan di Bali pada khususnya.

#### Food Security (Keamanan Pangan)

Keamanan dalam sektor pangan juga telah diatur dalam piagam HAM PBB yang tercantum dalam pasal 25, dimana dalam pasal tersebut salah satu kalimatnya menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas pangan. Adanya pasal ini akibat dari fenomena kelaparan yang banyak terjadi di negara - negara miskin. Tidak terpenuhinya pasokan makanan, jauhnya standar dan kualitas pangan menjadikan fenomena ini menjadi isu penting untuk dibahas, karena menyangkut kehidupan manusia. Berdasarkan data Organisasi Pangan Sedunia (FAO) tahun 1996 - 2002 menyebutkan bahwa kelaparan telah menyebabkan 30 juta penduduk dunia meninggal setiap tahunnya, dan 800 juta lainnya menderita kekurangan nutrisi yang kronis. Apabila kita lihat dalam kacamata perspektif *human security*, maka dapat kita ambil kesimpulan bahwa kelaparan mempunyai keterkaitan dengan faktor ekonomi. Apabila perekonomian seorang individu terancam maka dapat dipastikan akan menjalar pada sektor pangannya yang otomatis akan berkurang.

Krisis pangan juga menjadi salah satu faktor yang berdampak pada keamanan masyarakat. Apalagi pangan adalah kebutuhan utama masyarakat. Beras yang dihasilkan dari padi, kini semakin menipis produksinya. Hal ini di karena oleh makin tergesernya bidang pertanian dari perhatian pemerintah.

Terbukti Bali banyak kehilangan lahan potensial padi, dengan berubahnya sawah menjadi bangunan-bangunan berbeton. Jangka panjang yang tidak pikirkan bila makin menipisnya lahan persawahan di Bali khususnya dan di Indonesia pada umumnya.

Maka dari itu, agar keamanan pangan setiap manusia dapat terjamin, dibutuhkan usaha ekstra setiap negara untuk memperbaiki sektor ekonominya. Apabila sektor perekonomian, khususnya pertanian, bila sektor pertanian diperhatikan, maka dapat dipastikan sektor – sektor yang lainnya akan terjamin pula. Persoalan ini tidak hanya merupakan masalah internal dalam sebuah negara. Dan dibutuhkan kerjasama internasional untuk menanggulangi masalah kelaparan dan pangan. Memikirkan agar tradisi seperti subak di Bali dapat diperdayakan dan dikembangkan. Apabila masyarakat kelaparan, maka kaum elite dan kaum borjuis akan menjadi sasaran tidak kriminalitas dan anarkis dari kau tertindas. Dan hal ini akan mengganggu stabilitas keamanan Negara, dan ini bisa dimulai dari tingkat desa, yang menggiring generasi muda mencintai bidang pertanian.

#### Health Security (Keamanan Kesehatan)

Pasal 25 piagam HAM PBB juga menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas jaminan kesehatan. Kelahiran pasal ini juga tidak terlepas dari banyaknya penyakit – penyakit menular yang ada di negara – negara miskin dunia. Akibat kecanggihan transportasi penyakit menular ini yang semula terisolasi hanya di negara – negara tertentu menyebar dengan cepat melalui sarana transportasi. Sehingga menyebabkan penyebaran penyakit menular yang tidak terkendali. Akibat fenomena tersebut dibutuhkan upaya untuk penanggulangnya. Salah satunya dengan dibuatnya pasal ini, sebagai fondasi utama dalam menanggulangi penyebaran penyakit yang umumnya mematikan ini, agar penyakit-penyakit ini dapat dikontrol penyebarannya serta pengobatan segera bagi pengidapnya, sehingga tidak menular pada individu yang lainnya. Dengan adanya mekanisme seperti itu mungkin dapat dipastikan bahwa penyebaran penyakit itu dapat diminimalisir bahkan dihilangkan.

*Health Security* tidak hanya mencakup persoalan tentang penanggulangan penyakit menular, akan tetapi semua hal yang berkaitan dengan masalah kesehatan. Salah satu contoh kasusnya adalah tentang permasalahan kesehatan ibu dan anak yang kondisinya sangat memprihatinkan. Tercatat bahwa tingkat angka kematian ibu melahirkan di Indonesia sangat tinggi, yaitu 307 kematian dari 100.000 kelahiran. Dan belum lama ini ada kasus yang viral terkait ginjal akut pada anak. Dinas Kesehatan Provinsi Bali mencatat perubahan data kasus gagal ginjal akut misterius (*acute kidney injury/AKI*) pada anak. Berdasarkan data terbaru, Dinkes mencatat 18 kasus gagal ginjal akut pada anak hingga Sabtu. Dari jumlah ini, 12 orang di antaranya meninggal dunia, lima orang sembuh dan satu orang masih dirawat.

Bandingkan dengan negara Jepang yang sangat relatif rendah, yaitu 4 kematian dari 100.000 kelahiran. Hal ini tidak lain dipengaruhi juga oleh faktor tingkat perekonomian dalam sebuah negara. Jepang sebagai negara maju pasti secara ekonomi rata-rata penduduknya berpenghasilan di atas rata-rata. Hal ini berpengaruh dalam berbagai sektor, terutama kesehatan. Sehingga rata – rata apabila kita melihat pada negara – negara maju, permasalahan human security menjadi fokus utama dari pemerintahan negara tersebut setelah *national security*.

Hal ini jauh berbeda dengan apa yang terjadi di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Padahal anggaran yang dikeluarkan tidaklah sedikit untuk berbagai sektor, khususnya sektor kesehatan. Akan tetapi, anggaran yang diturunkan tidak semuanya digunakan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Ada yang digunakan untuk kebutuhan pribadi, bahkan digunakan bersama-sama untuk kepentingan kelompok tertentu. Inilah salah satu problem yang menjadi kendala bagi terwujudnya keamanan kesehatan dalam negara-negara berkembang. Selain itu di Bali belum lama ini juga terdapat kasus pelaporan seorang pemuda pada rumah sakit pemerintah di Bali, karena tidak tanggap dalam memberikan pelayanan pada masyarakat kecil. Bila mosi tidak percaya dialami masyarakat, maka akan berimplikasi pada keamanannya.

#### Environment Security (Keamanan Lingkungan)

Munculnya gagasan penjagaan terhadap keamanan lingkungan atau *environment security* bermula dari munculnya modernisasi industri atau industrialisasi. Gerakan environmentalisme yang bangkit sejak 1970an serta fakta terjadinya ancaman kerusakan lingkungan yang berpengaruh terhadap kesejahteraan manusia secara global, mendorong lingkungan menjadi salah satu isu yang sangat menonjol di era 1990an. Penelitian terkait dengan kebijakan negara dan lingkungan mulai banyak dilakukan. Beberapa terfokus pada kajian terhadap kerusakan lingkungan dalam kaitannya dengan konteks keamanan nasional. Mereka yakin bahwa kerusakan lingkungan membawa dampak negatif terhadap pertahanan negara. Kuncinya adalah kerusakan lingkungan melemahkan sumberdaya dan stabilitas politik sebuah negara, serta kebijakan yang tidak memperhatikan unsur lingkungan hanya akan membawa pada konflik karena kesejahteraan masyarakat akan turun. Kajian-kajian yang fokus pada hal tersebut mengarah pada

munculnya sebuah bidang kajian khusus yang nantinya akan disebut sebagai keamanan lingkungan hidup (Environmental Security).

Pada awalnya keamanan lingkungan hidup adalah perkembangan dari keamanan internasional dengan menambahkan fokus terhadap lingkungan hidup. Istilah keamanan lingkungan hidup mulai dikenal setelah Svensson mempresentasikan materi "*Environmental Security: A Concept*" pada *International Conference on Environmental Stress and Security* di Stockholm, Swedia tahun 1988. Sejak saat itu, istilah keamanan lingkungan hidup mulai digunakan oleh para sarjana. Keamanan lingkungan hidup merujuk pada konsep keamanan negara yang dicapai dengan memerangi kemiskinan, kerusakan lingkungan, dan kurangnya akses terhadap pengetahuan. Keamanan lingkungan hidup adalah tantangan utama menyangkut perubahan lingkungan global, dengan fokus pada interaksi antara ekosistem dan manusia, efek dari perubahan lingkungan global terhadap kerusakan lingkungan, dampak peningkatan permintaan sosial untuk sumber daya, jasa ekosistem, dan barang-barang yang terkait dengan lingkungan.

#### Community Security (Keamanan Komunitas)

Keamanan komunitas bertujuan melindungi orang dari lunturnya hubungan dan nilai tradisional, serta dari kekerasan sektarian, religi dan etnis. Komunitas tradisional, terutama kelompok etnis dan kepercayaan minoritas sering kali merasa terancam. Sekitar setengah dari seluruh jumlah Negara di dunia pernah mengalami ketegangan antar etnis. Kekerasan pun dapat mengancam keamanan komunitas, dimana komunitas adalah tempat bagi mayoritas orang untuk mencari identitas dan nilai-nilai yang sesuai dengan diri mereka. Biasanya kekerasan atau tindakan represif terjadi di kalangan komunitas etnis atau komunitas yang masih menerapkan praktik kehidupan tradisional. Mereka menjadikan tradisi sebagai pembenaran untuk aksi kekerasan, seperti perbudakan dan pelecehan seksual terhadap wanita. Rasa kecintaan terhadap etnis pun dapat memicu bentrok, biasanya hal ini terjadi dalam kasus diskriminasi ras.

#### Political Security (Keamanan Politik)

*Political security* erat kaitannya dengan perlindungan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan dari tekanan politik. Perlindungan ini menitik beratkan kepada basic kebebasan manusia dan hak asasi manusia.

#### Gender Mainstream dalam Melihat Keamanan

Di atas telah dijelaskan bahwa feminis mengkritisi tentang redefinisi ulang konsep keamanan. Sangat berbeda dengan teori-teori HI konvensional yang dari skala makro, bahwa keamanan dijamin oleh negara melalui seperangkat aparaturnya. Aparatur inilah yang kemudian menebarkan rasa aman kepada segenap rakyat di suatu Negara. IR feminis mendefinisikan ulang *security* kedalam tingkatan-tingkatan institusi yang kompleks sampai ke level keluarga. *Security* di sini segala bentuk kekerasan, termasuk di dalamnya kekerasan fisik, structural, dan ekologi, contohnya seperti pemerkosaan, subordinasi gender, kekerasan rumah tangga, dan lain-lain. Yang ditekankan oleh feminis ini adalah bagaimana keamanan individu di institusi terkecil yaitu keluarga membutuhkan keamanan yang ekstra dan setara sehingga berdampak ke level nasional bahkan global. Feminis juga melihat bagaimana andil perempuan dalam politik internasional melalui keterlibatan dalam pembuatan kebijakan global dan perperangan menentukan keamanan individu. Perperangan juga ikut dianalisis dalam kajian feminis. Perperangan secara sejarah berlangsungnya erat kaitannya dengan kekuatan dan maskulin, laki-laki terlibat dalam perencanaan dan prosedural. Maka dewasa ini feminis menawarkan bagaimana melihat perang dalam konsep feminis yang lebih mngedepankan unsur-unsur perdamaian ketimbang perperangan fisik yang merugikan.

#### Transnational Organized Crime (TOC)

Serupa dengan konsep gender mainstream, TOC lahir sebagai salah satu konsep keamanan kontemporer. Konsep TOC baru hadir seiring berkembangnya keamanan internasional, kemajuan teknologi informasi, politik global, dan perkembangan perdagangan internasional. Bertambah kompleksitasnya actor dalam hubungan internasional juga berdampak terhadap munculnya TOC. TOC merupakan salah satu bukti kebangkitan actor non-negara dalam kontestasi hubungan internasional. Jaringan criminal transnasional yang tersebar dalam system internasional menjadi bisnis gelap yang mengancam eksistensi keamanan. Kompleksitas TOC menyebabkan sulit untuk mendefinisikan TOC secara pasti, karena perkembangan TOC yang cepat. Pendefinisianya terbentur pada setiap disiplin ilmu, masing-masing kajian keilmuan memiliki definisinya tersendiri. Akan tetapi, terdapat beberapa sifat dari TOC, yaitu, dilakukan lebih dari satu Negara, seandainya terjadi di satu Negara, persiapan, perencanaan, dan kontrolnya dilakukan dari jarak jauh (Negara lain), Melibatkan organized criminal group di suatu Negara yang memiliki jaringan aktifitas criminal di Negara lain, dan berdampak terhadap Negara lain

TOC sekarang telah mendapatkan tempat tersendiri dalam kajian hubungan internasional, setelah sebelumnya teori-teori HI kurang mampu menjelaskan esensi dari TOC. Teori-teori tersebut adalah realism, liberalism, dan konstruktivisme. Ada lima elemen utama TOC yaitu, Pertama, *Perpetrators*, Aktor criminal yang melewati batas Negara (baik fisik maupun virtual), Kedua, *Product*, Barang yang dijual illegal baik berupa pencurian, masuk ke suatu Negara secara illegal, Ketiga, *People*, seseorang yang masuk ke suatu Negara dengan paksaan seperti melanggar prosedur imigrasi, Keempat, *Proceed*, keuntungan dari aktifitas illegal, dan Kelima, *Digital Signals*, transmisi sinyal digital yang berdampak terhadap perbatasan fisik sebuah Negara.

Proses globalisasi meningkatkan andil dan peran actor non-negara dalam kontestasi perpolitikan internasional. Secara perlahan tapi pasti Negara akan kehilangan kekuatannya dalam mengatur mekanisme pasar melalui arus liberalisasi dan perbatasan negara. Berbanding terbalik dengan syndicate kriminal yang justru tumbuh subur karena pasar mereka yang menjadi lebih luas dan lebar. Negara juga mengalami kesulitan disebabkan Negara kerap terbentur dengan birokrasi, politik, diplomasi, sedangkan sindikat criminal memiliki hukumnya sendiri. Masyarakat global tidak semuanya sepaham bahwa dirinya memiliki peran dan kewajiban masing-masing dalam politik. Sebagian membuat un-civil society untuk mengejar tujuan mereka (termasuk di dalamnya terorisme dan TOC). *Uncivil society* ini berpeluang menimbulkan kerusakan yang luar biasa tidak hanya dalam lingkup suatu Negara bahkan dunia global.

## Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keamanan nasional berbasis masyarakat adat di Bali telah berjalan sesuai dengan konsep falsafah *Tri Hita Karana*. Tri Hita Karana adalah ajaran agama hindu yang menitikberatkan untuk hidup harmonis dan saling toleransi dengan sesama (Paramandhita, 2017; Putrawan et al., 2021). Konsep ini menitikberatkan pada kesejahteraan masyarakat (Budiantara, 2018; Jaya, 2019). Salah satu faktor yang dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat adalah menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan. Menjaga keamanan suatu daerah merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan, karena dengan memiliki reputasi daerah yang aman akan menjadi daya tarik istimewa dari daerah tersebut. Begitupula dengan Bali yang terkenal akan adat istiadat serta pariwisatanya (Artajaya & Wiasta, 2020; Witari & Sariasih, 2020). Salah satu unsur yang harus diperhatikan guna mempertahankan peningkatannya kesejahteraan warganya adalah tercipta daerah yang aman dan damai. Keamanan dari segi ekonomi, keamanan pangan, keamanan kesehatan, keamanan politik serta keamanan lingkungan.

Bali sebagai pulau yang kaya akan adat dan budayanya serta dikenal sebagai desa adat yang memiliki awig-awig (Putrawan et al., 2021; Putri et al., 2018). Tentu berusaha menjaga keamanan dan kedamaian warganya. Tidak hanya mengandalkan aparat TNI dan POLRI. Namun Bali memiliki sistem keamanan adat yang disebut Sipandu beradat, meliputi: Pacalang, Pelindungan Masyarakat (Linmas); Bhayangkara Pembina Keamanan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas); dan/atau Pam Swadaya terdiri dari: Satuan Pengamanan (Satpam); dan/atau Bantuan Keamanan Desa Adat (Bankamda). Keberadaan Sipandu beradat salah satunya pecalang membawa dampak yang positif terhadap keamanan desa adat. *Pecalang* merupakan simbol petugas keamanan masyarakat adat di Bali. Dalam realitasnya, *Pecalang* sudah tidak lagi memfokuskan diri pada *Swadharmaning* adat dan agama. *Pecalang* telah menjadi salah satu identitas Pulau Dewata. Dalam pelaksanaan event berskala lokal sampai internasional. *Pecalang* dianggap berperan penting dalam menjaga keamanan di wilayah adat maupun wilayah penyelenggaraan suatu acara (Putra et al., 2021; Suciati, 2021).

Sehingga dapat dikatakan bahwa pecalang membawa perat yang penting guna mencapai keamanan nasional (Dewi, 2018). Karena keamanan nasional dapat tercipta dilihat dari masing-masing daerahnya. Oleh karena itu untuk mampu menciptakan keamanan baik dari segi pangan, ekonomi, lingkungan, komunitas, bahkan politik diperlukan kontribusi serta kerjasama dari semua elemen masyarakat. Karena faktor keamanan adalah salah satu faktor yang sangat berpengaruh terhadap pendapat dunia terhadap Negara kita. Sehingga kedepannya kita dapat bersaing serta menghadapi arus globalisasi dan perkembangan-perkembangan dunia Internasional. Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa keamanan nasional berpengaruh terhadap daya tarik suatu daerah (Dewi, 2018; Putra et al., 2021). Penelitian lainnya menunjukkan bahwa untuk menciptakan Negara yang aman dan damai, masyarakat perlu sadar untuk ikut serta menjaga keamanan daerahnya masing-masing (Markus et al., 2018). Sehingga diharapkan semua warga ikut berpartisipasi untuk ikut serta menjaga keamanan dan ketertiban lingkungannya agar tercipta masyarakat yang damai dan sejahtera.

#### 4. SIMPULAN

Konstruksi Konsep Pengelolaan Keamanan Nasional Berbasis Masyarakat Adat di Bali telah berjalan sesuai dengan konsep falsafah *Tri Hita Karana*. Tanpa mengabaikan realita fenomena keamanan dunia. Mengingat Bali adalah objek utama tujuan wisatawan baik lokal maupun internasional. Dalam wawancara yang penulis lakukan dengan para informan diantaranya: Ketua MDA Provinsi Bali, Kepala Kesbangpol Provinsi Bali, Kepala Dinas Pemajuan Desa Adat Provinsi Bali, Ketua Paiketan Pecalang Provinsi Bali. Adanya permasalahan keamanan dunia tentunya membuat masyarakat merasa diri terancam dan timbul konsep *human security*.

#### 5. DAFTAR PUSTAKA

- Artajaya, I. W. E., & Wiasta, I. W. (2020). Desa Adat Menjadi Benteng Terakhir Dalam Memutus Penyebaran Covid-19 Study Pada Desa Adat Tegallalang Gianyar Bali. *Prosiding Webinar Nasional Unmas Denpasar*. <http://e-journal.unmas.ac.id/index.php/webinaradat/article/view/1219>.
- Budiantara, I. K. D. (2018). Implementasi Ajaran Tri Hita Karana Pada Masyarakat Hindu Di Desa Sengkidu Kecamatan Manggis Kabupaten Karangasem. *LAMPUHYANG*, 8(2). <https://doi.org/10.47730/jurnallampuhyang.v8i2.64>.
- Dewi, N. M. L. (2018). Sinergitas Kemitraan Antara Polri Dengan Pecalang Dalam Menjaga Keamanan Desa Pakraman. *Kerta Dyatmika*, 15(2), 1–10. <https://doi.org/10.46650/kd.15.2.910.1-10>.
- Jaya, K. (2019). Membangun Mutu Pendidikan Karakter Siswa melalui Implementasi Ajaran Tri Hita Karana. *Jurnal Penjaminan Mutu*, 5(1), 57–67. <https://doi.org/10.25078/jpm.v5i1.759>.
- Mahadewi, I. G. A. M., Sukadana, I. K., & Suryani, L. P. (2020). Pengesahan Awig-Awig Desa Adat berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 1(1), 187–191. <https://doi.org/10.22225/jkh.1.1.2155.187-191>.
- Markus, A., Nayoan, H., & Sampe, S. (2018). Peranan Lembaga Adat Dalam Menjaga Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Di Desa Salurang Kecamatan Tabukan Selatan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe. *Jurusan Ilmu Pemerintahan*, 1(1).
- Paramandhita, A. (2017). Penerapan ajaran tri hita karana pada anak usia dini di TK Dharmayasa kecamatan Klungkung kabupaten Klungkung. *Jurnal Penelitian Agama Hindu*, 1(2).
- Pertiwi, P. R., & Mardiana, R. (2020). Dinamika Awig-Awig dan Pengaruhnya terhadap Keberlanjutan Tanah Adat. *JSKPM (Jurnal Sains Komunikasi Dan Pengembangan Masyarakat)*, 4(1), 125–136. <https://doi.org/10.29244/jskpm.4.1.125-136>.
- Purwita, P. U. (2018). Pengembangan Potensi Pantai Lovina Sebagai Ekowisata Pesisir Di Desa Kalibukbuk, Kabupaten Buleleng, Bali. *Jurnal Destinasi Pariwisata*, 6(1).
- Putra, I. B. A. J., Margi, I. K., & Wirawan, I. G. M. A. S. (2021). Pecalang Sebagai Agen Sosialisasi Berbasis Local Genius Dalam Menghadapi Covid-19 Dan Potensinya Sebagai Bahan Ajar Sosiologi Sma (Studi Kasus Di Desa Sawan, Sawan, Buleleng Bali). *Jurnal Pendidikan Sosiologi Undiksha*, 3(2). <https://doi.org/10.23887/jpsu.v3i2.39080>.
- Putrawan, I. N. A., Widnyana, I. M. A., Ekasana, I. M. S., K.Tus, D. S. A., & Vedanti, I. G. A. J. M. (2021). Penerapan Ajaran Tri Hita Karana Dalam Penyusunan Awig-Awig Sekaa Teruna Taman Sari Di Banjar Lantang Bejuh Desa Adat Sesetan. *Jayaoangus Press (Jurnal Penelitian Agama Hindu)*, 5(2). <https://doi.org/10.37329/jpah.v5i2.1276>.
- Putri, K. A. M. P., Puspitasari, N. W. F., Dewi, N. K. K., Ekarini, N. W., Dewi, I. A. P. P., Mertadana, & Kodi, D. P. (2018). Pengaruh Hukum Adat Atau Awig-Awig Terhadap Pengelolaan Dana Desa Di Desa Banjar Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng Provinsi Bali. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 8(1). <https://doi.org/10.23887/jinah.v8i1.19856>.
- Rindawan, I. K. (2017). Peranan Awig-Awig Dalam Melestarikan Adat Dan Budaya Di Bali. *Widya Accarya*, 7(1). <https://doi.org/10.46650/wa.7.1.433.%25p>.
- Saputro, G. E., & Meirinaldi. (2021). Pengaruh Stabilitas Makro Ekonomi, Stabilitas Keamanan Dan Pertumbuhan Industri Strategis Terhadap Pertumbuhan Ekonomi. *Jurnal Ekonomi*, 23(1). <https://doi.org/10.37721/je.v23i1.757>.
- Suadnyana, I. B. P. E. (2020). Desa Pakraman Sebagai Lembaga Adat Dan Lembaga Agama Bagi Kehidupan Masyarakat Hindu Di Bali. *Dharma Duta: Jurnal Penerangan Agama Hindu*, 18(1). <https://doi.org/10.33363/dd.v18i1.446>.
- Suadnyana, I. B. P. E. (2021). BAGA PALEMAHAN: Upaya Pelestarian Lingkungan Oleh Masyarakat Hukum Adat Bali. *Pariksa: Jurnal Hukum Agama Hindu*, 5(2). <https://doi.org/10.55115/pariksa.v5i2.1750>.
- Suarta, I. M. (2018). Nilai-nilai Filosofis Didaktis, Humanistis, dan Spiritual dalam Kesenian Tradisional Macapat Masyarakat Bali. *MURDA*, 33(2). <https://doi.org/10.31091/mudra.v33i2.364>.
- Suciati, D. A. P. (2021). Optimalisasi Peran Pecalang sebagai Representasi Desa Adat dalam Menunjang

- Percepatan Pencegahan Covid-19 di Provinsi Bali. *Jurnal Bali Membangun Bali*, 2(1). <https://doi.org/10.51172/jbmb.v2i1.151>.
- Sumarto, R. H., & Dwiantara, L. (2020). Pemberdayaan Masyarakat Dalam Tata Kelola Pariwisata Di Kampung Wisata Dewo Bronto Yogyakarta. *Journal Publicuho*, 2(4), 111-127. <https://core.ac.uk/download/pdf/287123456.pdf>.
- Witari, M. R., & Sariasih, K. (2020). Pengaruh Kegiatan Pariwisata Terhadap Tatanan Spasial Di Pura Desa Dan Pura Puseh Desa Adat Batuan, Gianyar. *Jurnal Anala*, 8(2), 43-52. <https://doi.org/10.46650/anala.8.2.987.43-52>.
- Zainudin, L. M., Afar, S. H., Aqsal, R. S., Nathasya, F. M. B., & Al-Fatih, S. (2022). *(Implementation of Traditional Sanctions in the Case of the Theft of Pratima in Panglipuran Village Bangli Bali)*. University of Muhammadiyah Malang. <https://doi.org/10.2139/ssrn.4274123>.